

Peran the Global Covenant of Mayors (GCoM) dalam Mewujudkan Mitigasi Perubahan Iklim di Kota Probolinggo tahun 2022 - 2023

Triastuti Sugiarto¹, Haryo Prasodjo²

^{1,2}Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

Dikirimkan: 24 January 2024

Direvisi: 08 Maret 2024

Diterbitkan: 31 Maret 2024

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran the Global Covenant of Mayors (GCoM) dalam mewujudkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kota Probolinggo. Pemanasan global yang terjadi menjadi isu yang sangat penting dan sedang dihadapi oleh negara – negara di seluruh dunia. GCoM memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan pengetahuan serta akses pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kota Probolinggo dan GCoM bekerjasama untuk mewujudkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data didapatkan dari wawancara tidak terstruktur serta dengan teknik studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa peran GCoM dalam membantu Kota Probolinggo pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan bentuk pelatihan sebagai bekal untuk perencanaan to net-zero emission di tahun 2050 dan juga membuka akses untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga – lembaga yang menjadi funding partner dari GCoM.

KATA KUNCI

Emisi Gas Rumah Kaca, GCoM, Kota Probolinggo, Perubahan Iklim

Pendahuluan

Perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global terjadi akibat dari proses suhu rata – rata laut, dataran bumi, hingga atmosfer yang mengalami peningkatan. Hal tersebut menjadi isu yang sangat serius yang sedang dihadapi negara – negara di seluruh dunia (Wahyuni & Suranto, 2021). The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mengungkapkan bahwa suhu permukaan bumi akan terus mengalami peningkatan mulai dari 1,0 °C hingga 5,7 °C dari tahun 1990 – 2100. Efek gas rumah kaca menjadi faktor utama perubahan iklim ini bisa terjadi (Edenhofer et al., 2015). Data dari IPCC menunjukkan bahwa perkotaan di seluruh dunia telah mengonsumsi energi dunia sebesar dua pertiga yang berdampak pada penghasilan emisi gas rumah kaca sebesar kurang lebih 70% (Edenhofer et al., 2015). Hal tersebut dapat menjadi dampak dari perubahan iklim menjadi lebih cepat. Adapun perubahan – perubahan yang akan terjadi yaitu naiknya permukaan air laut, intensitas cuaca ekstrim

Korespondensi:

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144.

Email: triastutisugiarto24@gmail.com , haryoprasodjo@umm.ac.id

akan terus meningkat, dan juga jumlah pola presiptasi akan berubah (Trenberth et al., 2007).

Seiring berkembangnya teknologi dan juga inisiatif dan ambisi kota – kota untuk mengurangi perubahan iklim pun meningkat (Bertoldi et al., 2018). Aksi tersebut dilakukan oleh kota – kota di seluruh dunia dengan bergabung dengan lembaga transnasional yang aktif dan memiliki tujuan utama dalam aksi perubahan iklim (Busch et al., 2018). Namun, penelitian menyatakan bahwa kontribusi kota dalam memerangi perubahan iklim masih kurang dikarenakan masih minim pengetahuan sistematis yang dimiliki (Edenhofer et al., 2015). Adanya kesenjangan terhadap akses pengetahuan dikarenakan tidak adanya referensi data inventarisasi emisi kota yang bersifat global dan juga perbedaan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan perhitungan emisi (Kona et al., 2018).

Pada tahun 2008, The European Commission atau Komisi Eropa membentuk The Covenant of Mayors (CoM) yang bertujuan untuk mendukung otoritas lokal Uni Eropa dalam mitigasi pencegahan perubahan iklim. Awalnya lembaga ini dikhususkan untuk daerah Timur Uni Eropa dan juga daerah Mediterania Selatan pada tahun 2011. Pada tahun 2015, tujuan dari lembaga ini diperluas lagi hingga mencakup adaptasi iklim, hingga pada tahun 2016 lembaga ini menjadi lembaga global dalam pembentukan The Global Covenant of Mayors (GCoM). GCoM pada saat ini merupakan aliansi global terbesar yang menangani isu terkait perubahan iklim dengan lebih dari 12.500 kota dan juga otoritas lokal telah bergabung menjadi bagian dari GCoM yang tersebar di 6 kontingen dan 144 negara yang mewakili lebih dari 1 milyar penduduk. Adapun tujuan dari GCoM yaitu (i) mengurangi emisi gas rumah kaca, (ii) menyiapkan rancangan aksi perubahan iklim, (iii) meningkatkan akses ke energi yang berkelanjutan. Selain itu, kota – kota anggota dari GCoM dapat berhubung satu sama lain dengan melakukan pertukaran pengetahuan dan juga dengan stakeholders yang menjadi partner dari GCoM. Target mitigasi yang telah dibuat oleh GCoM yaitu untuk mengurangi emisi global dengan pengurangan emisi sebesar 4.1 GtCO₂e di tahun 2050 (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, 2022).

Kantor pusat GCoM terletak di Brussels, Belgia dengan sebutan nama sebagai The Global Secretariat. Memiliki fungsi sebagai penghubung untuk menginspirasi ambisi kota-kota di seluruh dunia, sekaligus menggalang dukungan untuk isu-isu yang berpusat pada hubungan kota dan perubahan iklim. Adapun struktur kepengurusan di dalam lembaga GCoM yakni Co-Chairs sebagai jabatan tertinggi memiliki tugas sebagai orang yang memastikan, menetapkan, dan menerapkan arah dan strategi organisasi. Co-Chairs saat ini yang sedang menjabat adalah mantan Walikota New York, Michael R. Bloomberg dan juga jajaran Komisi Eropa, termasuk Patricia Espinosa Sekretaris Eksekutif dari United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Maimunah Mohd Sharif Direktur Eksekutif dari United Nation Human Settlements Programme (UN-Habitat), dan Direktur Eksekutif The Global Covenant of Mayors (GCoM). Dibawah itu ada The Board sebagai representasi dari region – region atau kontingen yang ada di GCoM, memiliki tugas untuk memberikan arahan yang strategis yang ditujukan ke para inisiasi kota. The Board saat ini beranggotakan sepuluh walikota dan otoritas lokal yakni dari Guelph – Kanada, Despeñaderos – Argentina, Warsaw – Polandia, Heidelberg – Jerman, Mykolaiv – Ukraina, Menjez – Lebanon, Kloto 1 – Togo, Makati – Filipina,

Yokohama – Jepang, dan Hobart – Australia; yang bertindak sebagai perwakilan jaringan dan memberikan perspektif regional yang spesifik sehingga dapat terus memastikan bahwa GCoM benar-benar dipimpin oleh walikota (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, n.d.).

Dalam menjalankan misinya untuk mengurangi perubahan iklim, GCoM memiliki beberapa partner untuk mendukung tujuannya, yaitu ada C40 Cities, the International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), United Cities and Local Government (UCLG) dan region - regionnya, the Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), dan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Urban Sustainability Directors Network (USDN), European Commission, European Committee of the Regions, Federation of Canadian Municipalities (FCM), Caribbean Association of Local Government Authorities (CALGA), the Council of European Municipalities and Regions (CEMR), Climate Alliance, Energy Cities, Euro Cities.

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas 56,667 km² (Dinas pekerjaan umum, n.d.). Kota Probolinggo dibagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, yaitu kecamatan Kedopok, Kademangan, Kanigaran, Mayangan, dan Wonoasih (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Prov. Jawa Timur, n.d.). Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Probolinggo sebanyak 243.000 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,70% di tahun yang sama (Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2023). Kepadatan penduduk di Kota Probolinggo mencapai 4.155,31 jiwa/km² di tahun 2017 (Dinas Pekerjaan umum, n.d.). Sedangkan jumlah ideal dari kepadatan penduduk yaitu 500 jiwa/km².

Peristiwa ini kemudian menimbulkan permasalahan baru, yaitu pada peningkatan emisi karbon yang berasal dari kegiatan – kegiatan seperti aktivitas ekonomi manusia, pembakaran bahan bakar dan penambahan jumlah limbah yang dihasilkan dari berbagai sektor yang ada (Wihardjo & Rahmayanti, 2021). Hal ini dibuktikan dari data laporan akhir kajian penurunan emisi gas rumah kaca serta aksi adaptasi dan mitigasi Kota Probolinggo tahun 2022 – 2030 mencatat bahwa emisi di Kota Probolinggo di tahun 2019 mencapai 811.878 ton CO₂e dan akan terus meningkat hingga tahun 2030 yakni sebesar 1.29.110 ton CO₂e. Sumber emisi gas rumah kaca di Kota Probolinggo pada tahun 2019 dibedakan menjadi empat sumber yaitu energi & transportasi, industri, pertanian & kehutanan, limbah (Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2022). Kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan jumlah 30% di sebuah kota wajib dipenuhi oleh pemerintah lokal (Andriyani, 2023). Oleh sebab itu, dalam rancangan pengurangan emisi gas rumah kaca di Kota Probolinggo, hal yang paling utama yang akan dilakukan adalah dengan membuka RTH di perkotaan dengan jumlah 30% (Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2022).

GCoM hadir sebagai aliansi yang berfokus untuk memerangi perubahan iklim dengan membantu kota – kota di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tidak terkecuali di Kota Probolinggo. Kota Probolinggo telah menjadi anggota dari GCoM yang tercantum dalam surat komitmen dari Pemerintah Kota Probolinggo pada masa jabatan Walikota Habib Hadi Zainal Abidin di tahun 2022 dan telah melakukan penandatanganan perpanjangan komitmen keanggotaan di GCoM. Dalam surat komitmen tersebut Pemerintah Kota Probolinggo berikrar untuk menerapkan kebijakan dan mengambil

langkah – langkah untuk (i) mengurangi/membatasi emisi gas rumah kaca, (ii) mempersiapkan diri untuk menghadapi dampak perubahan iklim, (iii) meningkatkan akses terhadap energi yang berkelanjutan, dan (iv) melacak perkembangan dalam mencapai tujuan – tujuan di atas.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Pertama, penelitian oleh Olvy Zuhriana (2022) yang berjudul “Peran UCLG-ASPAC Dalam Mendukung Tujuan Ke-17 (Khususnya Target Ke-16) *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran UCLG-ASPAC sebagai lembaga internasional dapat mendukung target ke-17 SDGs di Indonesia. Dimana tujuan ke-17 ini bertujuan untuk menguatkan perangkat implementasi dan merivitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini yakni peran atau bantuan dari UCLG-ASPAC yang difokuskan untuk Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi program hingga kebijakan daerah terkait SDGs.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu oleh Sporchia et al. (2022) berfokus pada the covenant of mayors yang membahas tentang bagaimana GCoM sebagai inisiasi melakukan pendataan data emisi gas rumah kaca yang dibantu oleh beberapa lembaga lain untuk ikut membantu mengkalkulasi data – data emisi setiap kota yang menjadi anggota dari GCoM. Dimana hal tersebut dapat membantu otoritas lokal ataupun pemerintah daerah dalam membuat kebijakan baru untuk memerangi atau menjadi aksi perubahan iklim.

Masih di tahun yang sama, More & Kurniawati (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Paradiplomasi dalam Kerjasama Pemerintah Daerah Tulungagung dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam menangani Permasalahan Sosial Anak” temuan dari penelitian ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Tulungagung dengan UNICEF menghasilkan dua program untuk yaitu Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (UPT PSAI) dan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam mengatasi permasalahan sosial anak yang terjadi di Tulungagung.

Dari beberapa penelitian tersebut bisa dilihat bahwa lembaga internasional sangat berperan penting membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan dan menanggulangi masalah yang sedang terjadi dengan cara mengembangkan berbagai program hingga membantu Pemerintah Daerah untuk merancang atau memperbaiki kebijakan yang ada. Sehingga penulis menemukan Research Gap dari penelitian ini yaitu penelitian ini berupaya membahas mengenai bantuan lembaga internasional dalam menangani perubahan iklim yang ada di daerah di Indonesia, terutama di daerah Kota Probolinggo. Peneliti menemukan bahwa masih sedikit penelitian yang membahas mengenai bantuan lembaga luar negeri khususnya GCoM yang ada di Indonesia, sehingga peneliti berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana upaya GCoM dalam membantu Kota Probolinggo merealisasikan pengurangan emisi gas rumah kaca yang ada di Kota Probolinggo hingga mencapai target yang telah direncanakan dalam Rancangan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca serta Aksi Adaptasi dan Mitigasi.

Teori paradiplomasi menekankan bahwa entitas subnasional, seperti kota, dapat memanfaatkan hubungan internasional untuk meningkatkan kapasitas pembangunan dan pengembangan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, GCoM menjadi

lembaga yang dianggap sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas kota dalam hal mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di Kota Probolinggo. Dalam konteks teori paradiplomasi, keterlibatan Kota Probolinggo dengan GCoM melalui program – program yang diberikan oleh pihak GCoM dalam merealisasikan pengurangan emisi gas rumah kaca merupakan bentuk kerjasama teknis luar negeri. Melalui program tersebut, Kota Probolinggo memperoleh akses dukungan teknis dan juga pendanaan internasional, sesuai dengan prinsip – prinsip paradiplomasi.

Di tahun 1980-an, Panayotis Soldatos yang merupakan akademisi dari Basque, Spanyol mengenalkan istilah baru yaitu “paradiplomacy”. Istilah ini hasil dari penggabungan antara “paralel” dan “diplomacy” yang merujuk pada konsep “kebijakan luar negeri non – pusat”. Ivo Duchacek mengusulkan istilah yang sama untuk konsep paradiplomasi yaitu “micro diplomacy” menurut Aldecoa, Keating, dan Boyer (Mukti, 2013).

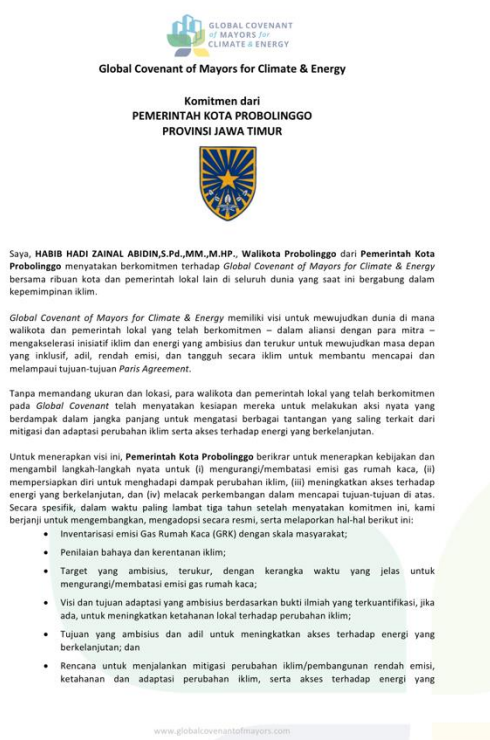
Paradiplomasi merupakan perilaku dan juga kapasitas untuk melaksanakan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh aktor “sub-national” atau pemerintah daerah, dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan daerah tersebut (Aldecoa & Keating, 1999). Secara umum, paradiplomasi dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh substansi di tingkat “sub-national” untuk mengembangkan hubungan diplomatik daerah tersebut dengan mitra asingnya. Dapat ditarik pengertian bahwa negara bukanlah substansi satu – satunya yang terlibat tetapi substansi di tingkat “sub-national” juga dapat mengambil peran aktif dan turut serta dalam kegiatan hubungan internasional demi kepentingan masing – masing daerah.

Di Indonesia sendiri, pemerintah daerah diperbolehkan atau diizinkan untuk melakukan kegiatan hubungan internasional atau diplomasi antar kota sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah pusat (Surwandono & Maksum, 2020). Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik paradiplomasi di Indonesia, yaitu isu – isu global yang telah di domestikasi, fragmentasi lembaga pusat yang sebelumnya kuat, dan desentralisasi kekuasaan (otonomi daerah). Praktik dari paradiplomasi ini bertujuan untuk mempromosikan kepentingan daerah secara spesifik (Mukti, 2013). Kekurangan dari praktik paradiplomasi dapat dilihat dari kekuatan – kekuatan kota di berbagai daerah. Kota yang kecil cenderung tidak dapat menjalankan diplomasi sebaik yang dijalankan oleh kota besar dikarenakan ada beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran akan diplomasi antar kota, kurangnya sumber daya manusia hingga sarana dan prasarana kota tersebut, hingga prosedur birokrasi yang sangat kompleks dan terkadang rumit untuk melakukan perjanjian yang menyebabkan kurangnya minat sumber daya manusia yang ada di pemerintahan daerah (Isnarti & Trisni, 2020).

Studi ini menggunakan tipe kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan wawancara kepada Ibu Hermaliana, ST.,MM yang merupakan pegawai di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA LITBANG Kota Probolinggo. Wawancara dilakukan secara mendalam tetapi tidak terstruktur dan pengambilan data dari hasil kajian dan juga beberapa jurnal artikel yang membahas tentang inisiasi GCoM dan perubahan iklim. Teknik analisa data yang dipakai oleh penulis yakni kualitatif sehingga penulis mencoba mencari data informasi tambahan yang relevan sebagai instrumen yang dapat mendukung artikel ini. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber di BAPPEDA LITBANG Kota Probolinggo dan data sekunder diperoleh dengan memakai teknik studi pustaka atau library research, yaitu pengumpulan data dari jurnal, artikel, kajian, dan laporan yang terkait dengan judul penelitian ini.

Alur Kerjasama Pemerintah Kota Probolinggo dengan GCoM



Gambar 1. Surat Komitmen antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan GCoM di tahun 2022

Sumber: Arisp Bappeda litbang Kota Probolinggo, 2023

Kerjasama antara Kota Probolinggo dan the Global Covenant of Mayors (GCoM) diawali dengan penandatanganan Commitment Letter atau Surat Komitmen pada tahun 2022. Setelah menandatangani Commitment Letter, anggota dari GCoM diharuskan untuk melakukan evaluasi dampak dan risiko dari perubahan iklim dan juga menyusun sasaran dan tujuan untuk melawan perubahan iklim yang harus memenuhi target yang telah ditetapkan oleh GCoM yaitu target pengurangan emisi gas rumah kaca hingga Net-Zero Emission (Roberto et al., 2023).

Kota yang sudah menjadi anggota dari GCoM tidak serta merta dapat mengikuti semua proyek yang telah disediakan. Kota yang sudah terdaftar menjadi anggota dari GCoM harus melakukan Common Reporting Framework (CRF) ke dalam CDP-ICLEI track, yang merupakan sistem untuk para otoritas lokal, perusahaan, hingga investor untuk memantau dan mengatur mengenai lingkungan, yang mana CDP ditetapkan sebagai sistem pelaporan mengenai lingkungan yang memiliki dataset sangat komperhensif (Sirait, 2023). Laporan yang telah diserahkan akan dinilai sesuai dengan standar CRF

yang mana hal ini akan berdampak pada the GCoM badges. The GCoM badges merupakan reward yang diberikan oleh GCoM kepada kota – kota yang telah memenuhi minimum target CRF dalam hal mitigasi, adaptasi, dan juga akses energi (Roberto et al., 2023).

Gambar 2. Alur yang harus dilalui oleh anggota GCoM agar mendapatkan pendanaan internasional untuk mendukung aksi perubahan iklim di masing – masing kota.



Sumber : GCoM National Workshop in Jakarta, Indonesia “Moving Towards Implementation: Alternative Opportunities for City-Level Climate Action”, 2023

Kota yang tergabung dalam aliansi GCoM harus melakukan evaluasi dampak dan risiko dari perubahan iklim seperti yang sudah tercantum dalam surat komitmen, Kota Probolinggo telah melakukan kajian mengenai Rancangan Aksi Daerah dalam menurunkan Gas Rumah Kaca (RADGRK) serta Aksi Adaptasi dan Mitigasi tahun 2022 – 2030. Kajian tersebut menggunakan analisis sensitivitas dimana sensitivitas dimaksudkan sebagai tingkatan suatu sistem yang dipengaruhi terhadap rangsangan terhadap tingkat penurunan emisi. Sebaliknya, semakin rendah sensitivitas suatu sistem, maka tingkat prioritas aksinya semakin rendah.

Peran GCoM untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Kota Probolinggo

Sebagai inisiasi yang bergerak dalam aksi pencegahan perubahan iklim, peran utama dari GCoM adalah sebagai lembaga yang membantu para anggotanya yaitu kota – kota di seluruh dunia untuk dapat mengakses pendanaan internasional. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh otoritas lokal untuk dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang ada di daerahnya.

Telah dijelaskan di paragraf sebelumnya bahwa anggota dari GCoM harus melakukan evaluasi dampak dan risiko dari perubahan iklim. Evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah tentu memerlukan biaya. GCoM dapat membantu kota tersebut untuk melakukan evaluasi perubahan iklim dan juga menyusun target dan sasaran yang ingin dicapai kepada kota yang masih terkendala baik dari segi kurangnya

sumber daya manusia yang memupuni maupun keuangan. Hasil dari evaluasi ini menjadi proposal yang akan diberikan kepada GCoM fund partner.

Setelah itu GCoM akan melakukan seleksi kepada kota – kota yang telah menyusun target dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Seleksi tersebut yang akan memutuskan bahwa kota tersebut layak mendapatkan pendampingan implementasi hingga pendanaan internasional atau tidak. Kota yang dapat melalui seleksi tersebut adalah kota – kota yang dapat menghitung target dan sasaran penurunan emisi gas rumah kaca hingga nol emisi atau net-zero emission di tahun 2050 atau secepatnya (Roberto et al., 2023).

Kota yang terpilih mendapatkan pendanaan internasional nantinya akan dibantu dalam tahap implementasi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ada di daerahnya. Salah satu contoh kota di Indonesia yang pernah mendapatkan dana internasional dari GCoM adalah Ibukota Jakarta. Tetapi pendanaan yang diberikan oleh GCoM kepada Pemerintah Kota Jakarta tidak bersifat fully funded artinya Pemerintah Kota Jakarta hanya mendapatkan dana kurang lebih 50% - 60% dari total dana yang diberikan oleh GCoM (Hermaliana, 2023). Bantuan implementasi bisa dalam bentuk yang berbeda di setiap daerah, tergantung kepada kebutuhan daerah masing – masing.

Untuk tetap memantau kondisi pergerakan emisi di kota – kota anggota GCoM, kota yang mendapatkan pendanaan internasional maupun yang tidak mendapatkannya tetap harus melaporkan data – data terkait emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim yang ada di kotanya melalui CDP-ICLEI track.

Hasil laporan akhir dari RADGRK Kota Probolinggo tersebut menjadi laporan evaluasi target dan sasaran adaptasi dan mitigasi di Kota Probolinggo. Laporan akhir yang berisikan sasaran dan tujuan untuk melawan perubahan iklim tahun 2022 – 2030 tersebut juga menjadi proposal dalam tujuan untuk pengajuan dana ke GCoM fund partner. Tetapi dalam realisasinya, Pemerintah Kota Probolinggo tidak dapat mendapatkan pendanaan dari GCoM, dikarenakan laporan akhir tersebut hanya mengkalkulasi sasaran penurunan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030 dan masih belum sampai pada net-zero emission, yang mana GCoM mengharuskan anggotanya untuk mengkalkulasi pengurangan emisi hingga mencapai net-zero emission pada tahun 2050 atau lebih cepat. Kurangnya sarana dan prasarana pemerintah Kota Probolinggo dalam mengkalkulasi penurunan emisi gas rumah kaca yang menjadi faktor mengapa Pemerintah Kota Probolinggo hanya mampu mengkalkulasi penurunan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030.

Walaupun masih belum mendapatkan bantuan dana untuk merealisasikan rancangan gas rumah kaca yang telah dikaji, GCoM tetap melibatkan para anggotanya, tidak terkecuali Kota Probolinggo untuk mengikuti kegiatan Workshop National yang mana workshop tersebut sering diadakan oleh GCoM SEA Secretariat dibawah naungan UCLG-ASPAC. Salah satu workshop yang pernah dilakukan yaitu workshop nasional GCoM di Indonesia yang bertempat di Kota Jakarta. Workshop tersebut bertujuan untuk membantu para otoritas lokal atau pemerintah daerah agar dapat mengakses pendanaan untuk aksi perubahan iklim dengan sumber pendanaan utama berasal dari Uni Eropa, yang bertemakan “Moving Towards Implementation: Alternative Opportunities for City-Level Climate Action” dengan objektif utama yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan skill otoritas lokal atau pemerintah daerah dalam

pendanaan aksi perubahan iklim, dengan target yaitu memberikan akses untuk memanfaatkan mekanisme pendanaan secara efektif untuk proyek mitigasi dan adaptasi iklim.

Sebagai aliansi yang membantu para anggotanya untuk mendapatkan pendanaan dalam merealisasikan aksi perubahan iklim, pendanaan utama GCoM bersumber dari Uni Eropa. Selain Uni Eropa, ada beberapa partner climate fund yang menjadi pendonor pendanaan untuk anggota – anggota GCoM. Pendanaan Green Climate Fund (GCF) oleh UNFCCC yang dibentuk pada Conference of Parties (COP) tahun 2010. GCF menyalurkan dananya melalui proyek ataupun program yang berfokus pada aksi mitigasi dan adaptasi. Di Indonesia, untuk dapat mendapatkan pendanaan dari GCF harus melalui Menteri Keuangan yang telah ditetapkan sebagai National Designated Authority GCF Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 756/KMK.10/2017 (Sekretariat NDA-GCF Indonesia & BKF - Kementerian Keuangan, 2023).

The City Climate Finance Gap Fund merupakan sumber pendanaan bagi GCoM dan juga anggotanya yang membantu kota - kota dalam bantuan teknis tahap awal dalam mengembangkan proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pendanaannya berasal dari donor, bank multilateral, dan juga lembaga pelaksana bersama GCoM, adapun pendanaan berasal dari European Investment Bank, The World Bank, Germany Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, Germany Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, dan The Government of the Grand Duchy of Luxembourg; Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development (Lee & Mesa, 2023). Selain itu ada United Nations Capital Development Fund (UNCDF), dan juga bantuan dari CDP yang pendanaannya berasal dari CDIA Trust Fund, FELICITY, C40, CFF, Green Building Performance Network (GBPN), City Climate Finance Gap Fund, ASEAN Catalytic Green Finance Facility untuk akses internasional, dan untuk pendanaan dari domestik berasal dari BPD LH, Bantuan Teknis PT SMI, Kendaraan Listrik WRI, GCF PPF dari Kementerian Keuangan.

Penutup

Penelitian ini membahas mengenai peran GCoM di Kota Probolinggo di tahun 2022 – 2023, dengan fokus yaitu pada implementasi GCoM sebagai inisiasi yang berfokus pada aksi perubahan iklim dapat membantu Kota Probolinggo untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang setiap tahunnya terus meningkat. Topik ini dianalisa dari perspektif paradiplomasi, dimana aktor – aktor “sub-national” seperti otoritas lokal atau pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan internasional dengan aktor negara, non-negara di negara lain. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa GCoM sebagai inisiasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global masih belum bisa membantu Kota Probolinggo dalam mendapatkan pendanaan internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang ada di Kota Probolinggo pada tahun 2030. Tetapi GCoM tetap memberi pendampingan berupa pendampingan teknis seperti mengikutsertakan Kota Probolinggo dalam kegiatan workshop yang diadakan di Jakarta, dan juga akses dengan kota – kota lain untuk bertukar pengetahuan dan teknologi hingga akses untuk mendapatkan pendanaan internasional dari proyek GCoM lainnya.

Penulis melihat bahwa evaluasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo menjadi peluang yang baik bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk berfokus tidak hanya kepada pengurangan emisi gas yang ada di Kota Probolinggo, tetapi juga pengelolaan dan juga pengurangan limbah sampah yang ada. Karena GCoM sebagai inisiasi global tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, namun juga berfokus pada pengelolaan limbah sampah dan akses energi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aldecoa, F., & Keating, M. (1999). *Paradiplomacy in action: the foreign relations of subnational governments*. FRANK CASS PUBLISHERS.
- Andriyani, L. (2023). Relasi Kuasa Pemerintah Surabaya Dalam Pemenuhan Ruang terbuka Hijau. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 77–98. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.15593>
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Prov. Jawa Timur. (n.d.). *Kota Probolinggo*. Retrieved January 16, 2024, from <https://jatim.bpk.go.id/kota-probolinggo/>
- Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo. (2023). *Kota Probolinggo dalam angka*. <https://probolinggokota.bps.go.id/publication/2023/02/28/5043991412b0c7639534e048/kota-probolinggo-dalam-angka-2023.html>
- Bappeda Litbang Kota Probolinggo. (2022). *Laporan Akhir Kajian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca serta Aksi Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Kota Probolinggo tahun 2022 - 2030*.
- Bertoldi, P., Kona, A., Rivas, S., & Dallemand, J. F. (2018). Towards a global comprehensive and transparent framework for cities and local governments enabling an effective contribution to the Paris climate agreement. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 30, 67–74. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.03.009>
- Busch, H., Bendlin, L., & Fenton, P. (2018). Shaping local response – The influence of transnational municipal climate networks on urban climate governance. *Urban Climate*, 24, 221–230. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2018.03.004>
- Dinas Pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan & kawasan pemukiman. (n.d.). *Demografi*. Retrieved January 16, 2024, from <https://dpuprpkp.probolinggokota.go.id/page/demografi>
- Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan & kawasan pemukiman. (n.d.). *Geografis Kota Probolinggo*. Retrieved January 16, 2024, from <https://dpuprpkp.probolinggokota.go.id/page/geografis#:~:text=Luas%20wilayah%20Kota%20Probolinggo%2C%20adalah%20berupa%20daratan%20seluas%2056%2C667%20km2>.
- Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y., Minx, J. C., Farhani, E., Kadner, S., Seyboth, K., Brunner, S., Savolainen, J., Zwinkel, T., Baum, I., Kriemann, B., von Stechow, C., Adler, A., Eickemeier, P., & Schlömer, S. (2015). Human Settlements, Infrastructure, and Spatial Planning. In *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change* (pp. 923–1000). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415416.018>

- Global Covenant of Mayors for Climate & Energy. (n.d.). *Who We Are*. Retrieved December 2, 2023, from <https://www.globalcovenantofmayors.org/who-we-are/#1599987354077-4be2295a-a996>
- Global Covenant of Mayors for Climate & Energy. (2022). *Energizing City Climate Action: the 2022 Global Covenant of Mayors Impact Report*. <https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2022/11/2022-GCoM-Impact-Report.pdf>
- Isnarti, R., & Trisni, S. (2020). The City of Padang Challenges For Paradiplomacy. *AEGIS : Journal of International Relations*, 4(2). <https://doi.org/10.33021/aegis.v4i2.1247>
- Kona, A., Bertoldi, P., Monforti-Ferrario, F., Rivas, S., & Dallemand, J. F. (2018). Covenant of mayors signatories leading the way towards 1.5 degree global warming pathway. *Sustainable Cities and Society*, 41, 568–575. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.05.017>
- Lee, J., & Mesa, C. (2023). *City Climate Finance Gap Fund*.
- More, A. A., & Kurniawati, D. E. (2022). Analisis Paradiplomasi dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah Tulungagung dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(2), 407–420. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i2.2213>
- Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*. The Phinisi Press.
- Olvy Zuhriana. (2022). *Peran UCLG-ASPAC Dalam Mendukung Tujuan Ke-17 (Khususnya Target Ke-16) Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. Universitas Lampung.
- Roberto, P., Peter, R., & Haems. (2023). *GCoM National Workshop in Indonesia “Moving Towards Implementation: Alternative Opportunities for City-Level Climate Action”*. Sekretariat NDA-GCF Indonesia, & BKF - Kementerian Keuangan. (2023). *GCF in Indonesia*.
- Sirait, H. (2023). *Pembiayaan Infrastruktur Kota yang Berkelanjutan dan Tangguh melalui CDP Matchmaker*.
- Sporchia, F., Marchi, M., Nocentini, E., Marchettini, N., & Pulselli, F. M. (2022). Sub-National Scale Initiatives for Climate Change Mitigation: Refining the Approach to Increase the Effectiveness of the Covenant of Mayors. *Sustainability*, 15(1), 125. <https://doi.org/10.3390/su15010125>
- Surwandono, S., & Maksum, A. (2020). The Architecture of Paradiplomacy Regime in Indonesia: A Content Analysis. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 22(1), 77. <https://doi.org/10.7454/global.v22i1.443>
- Trenberth, K. E., Smith, L., Qian, T., Dai, A., & Fasullo, J. (2007). Estimates of the Global Water Budget and Its Annual Cycle Using Observational and Model Data. *Journal of Hydrometeorology*, 8(4), 758–769. <https://doi.org/10.1175/JHM600.1>
- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>
- Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Penerbit NEM.

Wu, D. (2020). City Diplomacy, Multilateral Networks and the Role of Southeast Asia. *Jurnal Global & Strategis*, 14(1), 17. <https://doi.org/10.20473/jgs.14.1.2020.17-30>

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Ibu Hermaliana ST.,MM pegawai di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Litbang Kota Probolinggo yang berkenan untuk menjadi informan dalam proses penelitian ini berlangsung. Serta ucapan terima kasih untuk pihak – pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Narasumber

Hermaliana, Pegawai Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 13 Desember 2023, pukul 13.06 WIB.

Tentang Penulis

Triastuti Sugiarto merupakan mahasiswa strata-1 di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

Haryo Prasodjoe merupakan dosen Departemen Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang